



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/2/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALI KOTA MADIUN TAHUN 2023**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD harus melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan memperhatikan Capaian Kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023 perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Madiun tanggal 6 Maret 2024 Nomor 130/897/401.011/2024 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023;
  2. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 6 Maret 2024 Nomor 170/0584/401.040/2024 perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2023;
  3. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 7 Maret 2024 Nomor 00015/F.Demokrat/III/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2023;
  4. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 7 Maret 2024 Nomor 03/FPKB-03/III/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2023;
  5. Surat Ketua Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Madiun tanggal 7 Maret 2024 Nomor 003/F.PSI-Nasdem/III/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2023;
  6. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 8 Maret 2024 Nomor 170/0600/401.040/2024 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;

7. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 8 Maret 2024 Nomor 003/F.PDIP/III/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2023;
8. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal 8 Maret 2024 Nomor 004/F.Perindo/III/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2023;
9. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 8 Maret 2023 Nomor 05/F.Gerindra/III/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2023;
10. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun tanggal 8 Maret 2024 Nomor 03.002/F.PKS-PAN/III/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2023;
11. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 13 Maret 2024 dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023
12. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 13 Maret 2024 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah
1. melaksanakan Pendampingan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023 dengan Tenaga Ahli;
  2. melaksanakan Studi Banding Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023;
  3. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023 dengan Tim Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Madiun; dan
  4. menyusun Rekomendasi DPRD Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2023.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 13 Maret 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**



Ketua,

**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.**

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.040/2/2024  
TANGGAL : 13 MARET 2024

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALI KOTA MADIUN TAHUN 2023**

1. Ketua : drg. INDAH SAT RACHMANIATI
2. Wakil Ketua : Drs. SUTARDI
3. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
4. Anggota : ISMIATI, S.H. S.Pd.
5. Anggota : SUDJARWO, S.T.
6. Anggota : SIGIT AHIMSA
7. Anggota : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi., M.Pd.
8. Anggota : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, S.H., M.Hum.
9. Anggota : SLAMET HARIYADI
10. Anggota : F. BAGUS PANUNTUN
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**



Ketua,

**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.**